

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan Koperasi yang berada di Negara-negara maju. Perbedaan yang ada bukan hanya disebabkan oleh struktur sosial masyarakat di Indonesia yang masih bersifat tradisional, namun juga sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, ekonomi dan politik yang diterapkan. Di Negara-negara maju Koperasi telah mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang otonom dan mandiri, selain itu peran pemerintah untuk mendukung kegiatan perkoperasian di Negara seperti contohnya di Jepang dirasakan sangat besar.

Sedangkan kondisi di Negara berkembang khususnya Indonesia, peran Pemerintah terhadap kemajuan Koperasi saat ini dirasakan sangat kurang. Padahal kondisi seperti ini terus berlangsung baik pada Koperasi ditingkat lokal maupun nasional. Padahal menurut Pasal 62 UU No.25 Tahun 1992 yang berbunyi 1. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi. 2. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Oleh karena itu, Pemerintah harus melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Namun sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi.

Sesuai landasan hukum di Indonesia, Koperasi merupakan sebuah gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi perlu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip serta jati diri Koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Landasan hukum ini telah menjadikan Koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Oleh karena itu sebagai pilar ekonomi, pengembangan Koperasi baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang adalah hal mutlak dan masih diperlukan.

Selain kurangnya peranan pemerintah, kondisi kesadaran masyarakat Indonesia saat ini untuk berkoperasi juga terlihat masih sangat rendah. Dari kurang lebih 220 juta penduduk Indonesia saat ini, baru sekitar 27 juta individu anggota Koperasi atau sekitar 12,2% yang tergabung dalam 138.411 primer Koperasi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air (Menkop : 2006). Apabila dibandingkan dengan negara Jepang, jumlah anggota Koperasi disana sangat banyak, bahkan hampir 90% mayoritas penduduknya menjadi anggota Koperasi. Bahkan di Denmark, seluruh penduduknya menjadi anggota Koperasi bahkan mereka akan merasa malu apabila tidak menjadi anggota Koperasi.

Apabila dilihat secara kuantitatif, jumlah Koperasi di Indonesia mengalami peningkatan, namun jumlah peningkatan tidak diimbangi dengan jumlah Koperasi aktif yang jumlahnya terus menurun sedangkan jumlah Koperasi tidak aktif malah terus bertambah banyak setiap tahunnya. Sehingga

perkembangan jumlah Koperasi tiap tahunnya dapat dikatakan kurang baik seperti yang terlihat dari data yang tertera pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia

Tahun	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif (%)	Koperasi Tidak Aktif (%)
1998	59,441	46,420 (78 %)	13,021 (22 %)
1999	89,939	77,204 (85,8%)	12,735 (14,2%)
2000	103,077	88,930 (86,2%)	14,147 (13,8%)
2001	110,766	89,756 (81 %)	21,010 (19 %)
2002	117,906	93,049 (78,9%)	24,857 (21,1%)
2003	123,181	93,800 (76,1%)	29,381 (23,9%)
2004	130,730	93,402 (71,4%)	37,328 (28,6%)
2005	132,965	94,449 (71 %)	38,516 (29 %)
2006	141,326	98,944 (70 %)	42,382 (30 %)
2007	149,793	104,499 (69,7%)	44,794 (30,3%)
2008	155,301	108,966 (70 %)	46,335 (30 %)
Rata-rata	119.493,2	89.947,2 (76,19%)	29500,5 (23,8%)

Sumber : www.smecca.com 2009

Berdasarkan data diatas, kenaikan jumlah Koperasi tidak diimbangi dengan persentase jumlah Koperasi aktif karena sejak tahun 2000 hingga 2008 terus mengalami penurunan dan berbanding terbalik dengan persentase jumlah Koperasi tidak aktif yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah Koperasi ini seharusnya dapat menjadi sebuah prestasi, karena secara tidak langsung kondisi ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Negara Indonesia mengingat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan hal ini dapat diwujudkan dalam eksistensi Koperasi.

Permasalahan mengenai jumlah Koperasi diatas terjadi baik pada Koperasi primer maupun Koperasi sekunder. Seperti yang tertera pada Tabel perkembangan jumlah Koperasi Sekunder tingkat nasional yang diperoleh dari Laporan DEKOPIN dan dihitung berdasarkan periode waktu tertentu.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Koperasi Sekunder Tk. Nasional

Tahun Periode	Jumlah Koperasi	(%)
1999-2001	194	-
2001-2004	156	-19,6
2004-2006	125	-20
2006-2007	53	-57,6
2007-2008	60	13,2

(DEKOPIN dan Deputi Kelembagaan Kementerian Urusan Koperasi dan UKMK)

Pada Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Koperasi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 terus mengalami penurunan. Terlebih lagi pada periode tahun 2006-2007 jumlah Koperasi sekunder di tingkat nasional hanya sebanyak 53 Koperasi. Walaupun jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebanyak 60 Koperasi, dengan bertambahnya 7 Koperasi sekunder baru, namun tidak berpengaruh terlalu besar terhadap jumlah Koperasi sekunder yang aktif karena jumlahnya masih sebanyak 25 Koperasi, jumlah ini sama dengan jumlah Koperasi sekunder aktif yang diperoleh pada laporan terakhir DEKOPIN tahun 2006.

Berikut ini adalah daftar nama-nama 25 Koperasi sekunder yang dinilai masih aktif menurut DEKOPIN berdasarkan laporan terakhir tahun 2006.

Tabel. 1.3

Daftar Nama Koperasi Sekunder Aktif

No	Kop.Sekunder Tk.Nasional	Alamat
1	Induk Koperasi Kepolisian Indonesia (INKOPPOL)	Jalan Tambak No.2 Jakarta Pusat Telpon:(021) 31931330, 31931332 Fax:(021) 3162375
2	Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia IKP-RI	Jalan R. P. Suroso No. 21 Jakarta - 10330 Telpon:(021) 3100448, 3100422 Fax:(021) 3100959
3	Induk Koperasi TNI AD (INKOPAD)	Jalan Letjen S. Parman Kav.97 Tomang, Jakarta Barat Telpon:(021)5658514, 5659306 Fax:(021) 5658994
4	Induk Koperasi Pekerja Rokok, Makanan, Minuman (INKOP-RTMM)	Jalan Panjang No. 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telpon:(021) 53676894, 53676895, 53671753, 53670675 Fax:(021) 53676892
5	Induk Koperasi Tani dan Nelayan Andalan (INKOPTAN)	Ged. PBNNU Lt. IV, Jl.Kramat Raya No.64 Jakpus
6	Induk Koperasi Pondok Pesantren(INKOPONTREN)	Jalan Simprug Golf IV No. 104, Jakarta 10420 Telpon:(021) 3920069, 3920076 Fax:(021) 3920072
7	Induk Koperasi Angkutan(INKOPANG)	Jl. Kyai Maja, No.65 Blok IA, Jakarta Selatan
8	Induk Koperasi Syariah BMT (INKOPSYAH-BMT)	Ruko Pomad, Jl.Raya Ps. Minggu Jaksel
9	Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS)	Komp. Pasar Rumput No. 11 Sultan Agung - Jakarta Selatan Telpon:(021) 8280217, 83703044 Fax:(021) 8280217
10	Induk Koperasi Sawit Indonesia (IKSI)	DEKOPINwil Jambi
11	Induk Koperasi Purnawirawan ABRI (INKOPABRI)	Jalan Kebon Sirih No.61 Jakarta Pusat - 10340 Telpon:(021) 3141506 Fax:(021) 3141506
12	Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT)	Jl.Gunung Sahari III/11A Jakarta Pusat
13	Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia	Jalan Kramat Raya No. 16-AD, Jakarta 10420 Telpon:(021) 3920069, 3920076 Fax:(021)

	(INKOWAPI)	3920072
14	Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP)	Jalan M.T. Haryono Kav. 52-53, Jakarta 12770 Telpon:(021) 79191228 Fax:(021) 79191120
15	Induk Koperasi Tahu Tempe Indonesia (INKOPTI)	Gedung Binaraksa Lt. IV Jl. HR. Rasuna Said Kav. 18 Jakarta 12940 Telpon:(021) 2525483 Fax:(021) 2525483
16	Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL)	Jl. Boulevard BaraT. Kelapa Gading -Telpon:(021) 4516847, Fax:(021) 4516850
17	Pusat Koperasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (PUSKOP MABES TNI)	Jalan Raya Bogor No. 1, Cililitan Jakarta Timur 13510 Telpon:(021) 8096084, 8004056 Fax:(021) 8004056
18	Induk Koperasi Angkatan Udara (INKOPAU)	Komplek Triloka Blok A No. 9B, Pancoran Jakarta Selatan Telpon:(021) 7990491 Fax:(021)7943989
19	Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR)	<i>Jalan Tebet Barat dalam raya No. 15, Jakarta 12810 Telpon:(021) 8353631, 8353632 Fax:(021) 8290289</i>
20	Induk Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (INKOPINKRA)	Jl. Bandung Blok D No.248, Komp.Duren Raya Bekasi Timur
21	Koperasi Jasa Audit Nasional (KJAN)	Jalan Dharmawangsa Raya No. 18, Jakarta Selatan 12160 Telpon:(021) 7261563, Fax:021) 7261751
22	Induk Koperasi Wanita (INKOWAN)	<i>Jalan Dharmawangsa Raya No. 18, Jakarta 12160 Telpon:(021) 7394961 Fax:(021) 7222669</i>
23	Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)	Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 178, Jakarta 12870 Telpon:(021) 8301607,Fax:(021) 8290851
24	Gerakan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)	Wisma GKBI Lt.6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210 Telpon:(021) 5713434 Fax:(021) 5713430
25	Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO)	Jalan Lapangan Roos No 52/IV, Tebet Jakarta Selatan - 12830 Telpon:(021) 8292755

Sumber: Deputi Kelembagaan, Kementerian Urusan Koperasi dan UKM dan DEKOPIN 2006

Keberadaan Koperasi sekunder sendiri dinilai cukup penting terutama dalam kelangsungan hidup Koperasi primer anggotanya, dan diharapkan dapat menunjang segala aspek baik dari segi usaha maupun organisasinya sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini Koperasi-Koperasi sekunder baik tingkat nasional maupun provinsi terus terbentuk dan tumbuh dengan berbagai aktivitas. Namun

melihat kondisi di lapangan saat ini berdasarkan data diatas, penurunan jumlah Koperasi sekunder yang aktif saat ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya Koperasi yang merugi dan ditinggalkan oleh para anggotanya dan akhirnya tutup atau mengalami kebangkrutan contoh Koperasi Sekunder yang dinilai tidak aktif menurut DEKOPIN pada tahun 2006 adalah, Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia (INKOVERI), Induk Koperasi Perunggasan Indonesia (INKOPSI), Induk Koperasi Jamu Indonesia (INKOPJAM), Induk Koperasi Werdatama (INKOPTAMA), Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA), Induk Koperasi Syirkah Muamanah (INKOPSIM). (Sumber: Laporan DEKOPIN 2006)

Induk-induk Koperasi yang aktif itu pun seolah permanen. Kenyataannya, sesuai catatan di bagian administrasi DEKOPIN, induk Koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas terhadap anggota, pada tahun buku 2004 hanya 13 induk. Tahun buku berikutnya atau RAT tahun buku 2005, hanya bertambah satu unit menjadi 14 induk. Artinya, dari seluruh induk Koperasi hanya sekitar seperempat yang aktif. (Sumber : Pusat Informasi Perkoperasian (PIP))

Banyak kalangan menilai bahwa pertumbuhan Koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pertumbuhan kuantitas Koperasi tidak diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga banyak Koperasi yang tidak aktif. Salah satu faktor utamanya disebabkan oleh karena masih banyak anggota yang kurang berpartisipasi aktif didalam kehidupan berKoperasi, padahal partisipasi anggota dalam Koperasi sangat penting peranannya untuk memajukan

dan mengembangkan Koperasi sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh **Ropke (2003:39)** yang menyatakan bahwa : “Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja Koperasi, akan lebih besar”.

Partisipasi Anggota merupakan peran serta anggota dalam mengawasi jalannya usaha, permodalan dan menikmati keuntungan usaha serta keterlibatan anggota dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan Koperasi. Tanpa adanya partisipasi anggota, Koperasi tidak akan ada artinya, dan tidak dapat bekerja secara efisien dan efektif. Namun dalam prakteknya sebagian besar anggota Koperasi kurang berpartisipasi secara aktif terhadap Koperasinya sehingga Koperasi kurang berkembang. Hal ini sama halnya dengan yang terjadi pada Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO).

Walaupun KOPINDO tercatat sebagai salah satu dari 25 Koperasi sekunder tingkat nasional yang masih aktif menurut DEKOPIN saat ini, namun kondisi Koperasi sekunder ini terancam akan mengikuti jejak Koperasi sekunder lainnya yang telah mengalami kebangkrutan karena tingkat partisipasi anggotanya yang cukup rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya akibat dari rasa ketidakpercayaan anggota kepada kinerja pengurus KOPINDO sehingga timbul permasalahan seperti yang terjadi pada RAT KOPINDO Tahun 2009 di Lampung. Ketidakpercayaan anggota kepada kinerja pengurus juga akan berimbas kepada jumlah modal simpanan anggota, karena anggota semakin jarang membayarkan simpanannya di KOPINDO.

KOPINDO adalah Koperasi sekunder tingkat nasional yang berada di kalangan generasi muda Indonesia. Pada awalnya yang termasuk dalam anggota KOPINDO dikelompokkan menjadi lima, yaitu, Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Koperasi Pramuka (KOPRAM), Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN), Koperasi Siswa (KOPSIS), dan Koperasi Pemuda (KOPDA). Namun seiring berjalannya waktu keanggotaan di tubuh KOPINDO sendiri terus mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa data berikut.

Tabel. 1.4
Daftar perkembangan Jumlah Anggota KOPINDO

No	Tahun	Jumlah Anggota	Δ	$\Delta\%$
1	2005	103	-	-
2	2006	101	2	1,98%
3	2007	98	3	3,06%
4	2008	92	6	6,52%

Sumber : Laporan RAT Tahun 2005-2008 dan Laporan Pengawas KOPINDO

Koperasi primer anggota KOPINDO yang berjumlah 92 Koperasi tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mempermudah akses informasi maka dibentuk beberapa koordinator wilayah yang meliputi daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Sumatera, Sulawesi, dan Jakarta. Untuk keanggotaan di Jawa Barat sendiri jumlahnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2007 berjumlah 19 Koperasi, kemudian pada tahun 2008 berjumlah 12 Koperasi, dan diperkirakan pada tahun 2009 inipun akan mengalami penurunan kembali. Namun sangat disayangkan pengelolaan database keanggotaan di KOPINDO belum cukup baik, hal ini karena pengurus tidak menyimpan nama-nama anggota KOPINDO setiap tahun, saat ini pengurus periode 2009-2012 baru

akan mengadakan penghitungan kembali anggota yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif melalui program kerja bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dari seluruh anggota KOPINDO yang berjumlah 92 Koperasi primer ini dapat dikatakan tidak semuanya aktif, bahkan ada beberapa yang tengah mengalami kebangkrutan dan tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi. Karena bila dilihat dari kontribusi kehadiran pada saat Rapat Anggota Tahunan saja, jumlah peserta yang hadir selalu kurang dari 50% dari total seluruh anggota, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini

Tabel. 1.5
Jumlah Peserta RAT KOPINDO
Periode 2006-2008

Tahun	Jumlah Anggota yang hadir	Persentase Kehadiran (%)
2006	42	41,5
2007	38	38,7%
2008	35	38%

Sumber, Laporan Kopindo

Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah Koperasi, dimana anggota dapat menyuarakan aspirasi dan memberikan kontribusi untuk kemajuan Koperasinya. Namun anggota yang menyadari hal tersebut masih relatif sedikit baru sekitar 30% dari seluruh anggota yang ada. Mayoritas anggota yang aktif berasal dari pulau Jawa terutama Jawa Barat dimana selalu berusaha untuk mengikuti RAT tiap tahunnya.

Secara umum mengenai kondisi KOPINDO saat ini lebih lengkapnya akan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel. 1.6
Perkembangan Keragaan Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO)
Periode 2005-2008

Tahun	2005	2006	2007	2008
SHU	66.780.490	13.497.377	174.101.979	214.121.093
Volume Usaha	410.503.800	451.255.300	753.254.019	888.023.378
Modal Sendiri	142.235.246	142.227.000	172.655.246	221.921.546
Modal Luar	537.205.158	1.517.816.667	1.717.816.667	1.517.816.667

Sumber: Laporan RAT KOPINDO, data diolah

Apabila dilihat dari data diatas perkembangan keragaan pada KOPINDO yang meliputi jumlah perolehan SHU dan volume usahanya relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya dan relatif stabil. Namun apabila dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh KOPINDO, jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan modal luar yang dimiliki KOPINDO. Padahal modal sendiri merupakan suatu ciri khas yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lainnya. Hal ini sesuai prinsip kemandirian yang dimiliki oleh Koperasi, yaitu Koperasi secara mandiri membangun dan dikendalikan oleh anggotanya termasuk dalam penghimpunan modal tanpa harus bergantung dengan pihak luar.

Modal dari pihak luar dan bukan dari anggota KOPINDO berdasarkan catatan laporan hasil keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada RAT tahun 2009 lalu, diperoleh dari PT Bank Bukopin Tbk, kerjasama usaha di beberapa unit usaha, misalnya di KOPINDO Wisata dengan PT. Shafira, ataupun dengan PT. Sampoerna dalam pengadaan usaha Alfamart, ada juga modal penyertaan pada usaha Deterjen.

Rendahnya jumlah modal sendiri di KOPINDO disebabkan karena rendahnya partisipasi anggota dalam hal penyertaan modal, karena hampir seluruh

anggota memiliki tunggakan membayar simpanan-simpanan. Data terakhir di periode 2005-2008 dengan anggota berjumlah 92 orang, sebanyak 4,39% belum membayar simpanan pokok, dan sebanyak 73,91% belum melunasi tunggakan pembayaran simpanan wajib. Untuk lebih jelas mengenai jumlah besaran tunggakan simpanan anggota KOPINDO, berikut ini adalah data tunggakan simpanan anggota di KOPINDO periode 2005-2008.

Tabel. 1.7
Tunggakan Simpanan Anggota KOPINDO Periode 2005-2008

Jumlah Anggota	Tunggakan Simpanan Anggota KOPINDO	
	Simp. Pokok (%)	Simp. Wajib (%)
92	4,34	73,91

Sumber, Laporan RAT KOPINDO, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.7 tersebut, 4,34% anggota atau sebanyak 4 anggota belum melunasi simpanan pokok kepada KOPINDO. Koperasi primer tersebut adalah KOPMA STHB, KOPMA Universitas Wijaya Kusuma, dan KOPMA Univ.Parahiyanan. Sedangkan sebanyak 68 Koperasi atau sebesar 73,91% belum melunasi simpanan wajib kepada KOPINDO atau masih memiliki tunggakan simpanan dan harus segera dibayarkan kepada KOPINDO.

Koperasi primer yang tergabung di Korwil Jawa Barat yang selalu disebut selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh KOPINDO, namun dalam hal penyertaan modal termasuk dalam kategori yang memprihatinkan. Padahal modal merupakan unsur pokok bagi setiap pengusaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk bagi Koperasi. Seperti yang diungkapkan oleh **Arifinal Chaniago (1997:8)** bahwa :“Besarnya lapangan usaha Koperasi tergantung pada besar kecilnya modal yang dihimpun baik dari

anggota maupun dari non anggota”. Untuk lebih jelas mengenai jumlah besaran tunggakan simpanan anggota KOPINDO di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1.8
Simpanan dan Tunggakan Simpanan Anggota
Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) Jawa Barat
Per 31 Desember 2008

No	Nama Anggota	Jumlah Simpanan				Total simpanan seharusnya diterima
		Simpanan yang dibayar (Rp)	(%)	Tunggakan Simpanan (Rp)	(%)	
1	KOBADA Cianjur	598.443	27,3	1.590.000	72,7	2.188.443
2	KOPMA BS UPI Bandung	974.925	41	1.404.000	59	2.378.925
3	KOPMA UNPAD Bandung	1.859.822	47	1.435.000	53	3.924.822
4	KOPMA UNPAS Bandung	529.623	25,6	1.535.000	74,4	2.064.923
5	KKM UNISBA Bandung	270.930	12,4	1.900.000	87,6	2.170.930
6	KOPMA Univ. Kebangsaan	129.530	6	2.010.000	94	2.139.530
7	KKM Bandung	859.200	31,3	1.879.000	68,7	2.738.200
8	KOPMA UNSIL Tasikmlaya	239.211	11,2	1.900.000	88,8	2.139.211
9	KOPMA UIN SGD Bandung	160.000	10,8	1.320.000	89,2	1.480.000
10	Koppontren Bobos Cirebon	547.000	27,3	1.453.000	72,7	2.000.000
11	KOPMA STAIN Cirebon	1.470.000	73,5	530.000	26,5	2.000.000

Total	7.638.684	100	16.956.000	100	25.224.984
--------------	------------------	------------	-------------------	------------	-------------------

Sumber, Laporan Keuangan KOPINDO

Dari data diatas dapat dilihat bahwa angka partisipasi khususnya dalam penyertaan modal masih sangat rendah, padahal seperti yang kita ketahui bahwa modal sendiri dari sebuah Koperasi adalah terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Permodalan ini sangat berpengaruh pada kondisi keuangan sebuah Koperasi baik dari segi usaha maupun organisasinya. Total simpanan yang dibayarkan ke KOPINDO baru sebesar 28,7% dari total simpanan yang seharusnya diterima oleh KOPINDO.

Sedangkan kontribusi simpanan yang diberikan anggota KOPINDO Jawa Barat kepada KOPINDO Pusat hanya sebesar 3,3% dari total simpanan KOPINDO Pusat yaitu sebesar Rp. 186.177.000,-. Kondisi permodalan di KOPINDO cukup mengkhawatirkan mengingat KOPINDO merupakan Koperasi sekunder yang berada di tingkat nasional. Apabila dibandingkan dengan kondisi permodalan di Koperasi Universitas Jepang dengan jumlah simpanan yang diterima yaitu sebesar Rp. 1.043.534.280.000,- (*NFUCA University Co-op Report: 2008*) maka KOPINDO tertinggal sangat jauh. Kondisi permodalan seperti ini akan mengganggu jalannya kegiatan di sebuah Koperasi termasuk di KOPINDO yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan baik kegiatan usaha maupun organisasinya.

Permasalahan yang terjadi di KOPINDO jelas harus segera diatasi mengingat KOPINDO adalah Koperasi sekunder yang berada di tingkat nasional dan berada di kalangan generasi muda serta menjadi bagian dari gerakan Koperasi

nasional juga dapat menjadi wadah bagi Koperasi-Koperasi primernya yang dapat melahirkan generasi-generasi harapan Koperasi dimasa yang akan datang sehingga mampu mempertahankan keberadaan Koperasi di tengah-tengah persaingan global saat ini.

Apabila dibandingkan dengan Koperasi yang sejajar dengan KOPINDO, contohnya gabungan Koperasi Universitas di Jepang yang bernama *National Federation of University Co-operative Associations* (NFUCA) atau Koperasi sekunder yang mewadahi Koperasi-Koperasi Universitas di seluruh Jepang. Untuk melihat perbedaan KOPINDO dan NFUCA dapat terlihat pada tabel 1.9 berikut ini :

Tabel 1.9
Perbandingan KOPINDO dan NFUCA

No	Indikator	KOPINDO	NFUCA
1	Jenis Koperasi	Koperasi Konsumen	Koperasi Konsumen
2	Jumlah Anggota tahun 2008	92 Koperasi Primer	228 Koperasi Primer
3	Korwil yang dimiliki	10 Wilayah	7 Wilayah
4	Unit Usaha	Penginapan, Alfamart, Tour dan Travel, jasa konsultan	Toko Buku, Restoran dan Kafetaria, Asrama dan Aparteman, Jasa Asuransi, Pengadaan Komputer
5	Besaran Simpanan Wajib per tahun	Rp.240.000,-	¥ 16.000 (dalam kurs Rp 1.084 = Rp. 17.344.000)
6	Total Simpanan Anggota tahun 2008	Rp. 186.177.000,-.	¥ 962.670.000 (dalam kurs Rp 1.084 = Rp.1.043.534.280.000,-)
7	Total Pendapatan dari anggota tahun 2008	Rp. 0,-	¥ 203.500.000.000. (dalam kurs Rp. 1.084 =

			Rp.220.594.000.000.000)
--	--	--	-------------------------

Sumber : Laporan KOPINDO Tahun 2008, dan *University Co-op Report 2008*

Dari tabel 1.9 diatas, dapat diketahui KOPINDO dan NFUCA sama- sama Koperasi Sekunder yang bergerak pada kegiatan konsumsi. Untuk keanggotaan, KOPINDO memiliki 92 anggota yang terdiri dari Koperasi primer yang berada di kalangan generasi muda yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan NFUCA memiliki 228 anggota yang terdiri dari Koperasi-Koperasi Universitas di seluruh Jepang.

Perbedaan yang paling mencolok pada kedua Koperasi diatas yaitu pada Total pendapatan yang diterima dari anggota berupa pemanfaatan jasa pelayanan kepada anggota, NFUCA untuk satu tahun periode saja memperoleh pendapatan sebesar ¥ 203.500.000.000 atau apabila dihitung dengan kurs rupiah sekitar Rp.220 triliun.(*Annual Report Coop-University 2008*). Sedangkan KOPINDO hingga tahun 2008 belum memiliki data pendapatan dari anggota, atau dapat dikatakan anggota tidak melakukan partisipasi usaha. Hal ini disebabkan karena pelayanan usaha yang diberikan kepada anggota bukan berdasarkan pada kebutuhan anggota, berbanding terbalik dengan NFUCA dimana semua kegiatan pelayanan baik yang dirasakan langsung maupun tidak langsung disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Besarnya simpanan juga dapat mempengaruhi kondisi sebuah Koperasi, simpanan anggota yang berada di KOPINDO hanya sebesar Rp.240.000,- /tahun sedangkan di NFUCA sebesar ¥ 16.000 atau sekitar Rp.17 juta. Melihat kondisi permodalan seperti ini, rasanya tidak aneh jika pelayanan yang diberikan oleh

KOPINDO kepada anggota belum maksimal. Karena dalam pelaksanaan kegiatan usahanya masih bergantung dengan pihak luar bukan dari kekuatan modal sendiri, terlebih lagi dengan banyaknya anggota yang memiliki tunggakan simpanan.

Uraian permasalahan diatas memperlihatkan beberapa indikator yang menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi anggota di KOPINDO, sehingga muncul pertanyaan melihat fenomena diatas yaitu “ mengapa tingkat partisipasi anggota di KOPINDO khususnya wilayah Jawa Barat terus mengalami penurunan?”. Padahal indikator dari keberhasilan sebuah Koperasi adalah dilihat dari tingkat partisipasi anggotanya seperti ditegaskan oleh **Syamsuri SA** (1986 :167) adalah sebagai berikut:

Partisipasi anggota dalam Koperasi mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan Koperasi. Karena Koperasi pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi swadaya dari oleh dengan dan untuk anggota. Oleh karena itu maju mundur Koperasi itu ditentukan oleh anggota Koperasi itu sendiri.

Keterlibatan dan peran serta anggota dalam Koperasi wujud nyata dari kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan perkembangan usaha Koperasi agar dapat tumbuh menjadi badan usaha yang berskala besar. Sedangkan kondisi yang terjadi di KOPINDO, partisipasi anggota khususnya dalam penyertaan modal sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya rasa percaya dari anggota terhadap pengurus, atau karena sikap kurang disiplin dan lalai dari anggota dalam memenuhi kewajibannya kepada KOPINDO. Ketika anggota tidak memenuhi kewajibannya kepada KOPINDO, seharusnya pengurus dapat mengambil langkah tegas sesuai yang

tercantum dalam AD-ART KOPINDO dan tidak membiarkan permasalahan ini terus terjadi.

Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi anggota diantaranya seperti yang dikemukakan oleh **M. Amin Azis** yang dikutip oleh Sri Edi Swasono (1997:312) sebagai berikut: “ Sejumlah faktor yang menentukan tertariknya partisipasi anggota faktor tersebut adalah manajemen Koperasi, hubungan Koperasi dengan lembaga lain dan pelayanan Koperasi”

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dan mengambil judul **“PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL PENGURUS DAN PELAYANAN KOPERASI TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA “ (Suatu Kasus Pada Koperasi Primer Anggota Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) Wilayah Jawa Barat).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota dalam berkoperasi dan juga karena keterbatasan peneliti, maka hanya akan diambil faktor manajemen Koperasi khususnya kemampuan manajerial pengurus dan faktor pelayanan. Maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti.

Untuk itu penulis merumuskan permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap tingkat partisipasi anggota?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan Koperasi terhadap partisipasi anggota?
3. Apakah kemampuan manajerial dan pelayanan Koperasi berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi anggota.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap pelayanan Koperasi
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan Koperasi terhadap tingkat partisipasi anggota
3. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap partisipasi anggota
4. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan pelayanan Koperasi terhadap partisipasi anggota

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian Ekonomi dan Koperasi

2. Guna Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya pengurus KOPINDO dalam merumuskan dan menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi. Serta kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.